BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada 24 Februari 2022, tatanan keamanan Eropa yang telah dibangun sejak Perang Dunia II mengalami guncangan yang berat. Rusia melancarkan invasi militer skala besar ke Ukraina. Aksi ini merupakan sebuah tindakan yang tidak hanya melanggar kedaulatan negara tetangganya, tetapi juga menghancurkan asumsi fundamental tatanan keamanan pasca-Perang Dingin mengenai ketidakmungkinan perang antarnegara besar di benua Eropa (Rabinovych, 2025). Invasi ini merupakan eskalasi dari agresi yang dimulai pada 2014 dengan aneksasi Krimea, namun skala dan intensitasnya jauh melampaui apa pun yang terjadi sebelumnya (Krotz dkk., 2025). Konflik 2014 memiliki cakupan yang lebih kecil dengan konflik yang berfokus di wilayah timur Ukraina, sedangkan konflik 2022 mencangkup perbatasan utara, timur, dan selatan dari Ukraina (Davies dkk., 2023; Pettersson & Wallensteen, 2015). Dengan skala yang masif ini, Perang Rusia-Ukraina 2022 ini sering disebut sebagai perang besar di Benua Eropa setelah Perang Dunia I dan *unprecedented military assault* (Kottasová, 2022).

Menanggapi hal ini, muncul berbagai macam respons yang berbeda dari berbagai negara. Negara-negara *Global South* merespons masalah ini dengan mengadopsi posisi netral (Rabel, 2025). Sedangkan negara barat seperti Amerika dan negara-negara Eropa cenderung untuk mengecam aksi invasi Rusia dan secara umum memberlakukan sanksi (Rabel, 2025). Eropa dengan cepat menyadari bahwa perang ini bukan sekadar konflik regional, melainkan ancaman eksistensial terhadap nilai-nilai demokrasi liberal dan tatanan keamanan yang telah mapan. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memperingatkan bahwa "meningkatnya tagihan makanan dan energi berarti masa-masa sulit bagi banyak rumah tangga di Eropa" akibat konflik di Ukraina (NATO, 2022). Lebih dari itu, invasi ini memaksa Eropa untuk merevisi secara radikal kebijakan pertahanan dan keamanannya, bergeser dari ketergantungan historis pada *soft power* menuju

strategi pertahanan yang lebih otonom dan asertif (Genini, 2025). Invasi Rusia memicu serangkaian perubahan mendasar dalam catur politik Eropa. Literatur akademik terkini mencatat bahwa perang ini bertindak sebagai "faktor eksternal" yang memaksa Uni Eropa dan negara-negara anggotanya untuk memberikan respons dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya (Krotz dkk., 2025). Uni Eropa, yang sebelumnya membatasi diri pada sanksi ekonomi dan bantuan kemanusiaan, untuk pertama kalinya dalam sejarahnya menyediakan peralatan militer untuk Ukraina, dimana hal ini merupakan sebuah perubahan kebijakan yang signifikan (Alexandrescu, 2025).

Negara-negara Eropa Selatan seperti Italia, Spanyol, Portugal, dan Yunani, menjadi contoh menarik dari transformasi sikap ini. Penelitian yang dilakukan oleh Grygoriy Riy menunjukkan bahwa pemerintah negara-negara ini mengubah secara total kebijakan mereka terhadap Ukraina. Ketika aneksasi Krimea 2014 terjadi, negara-negara tersebut cenderung pragmatis dan enggan memutus hubungan dengan Rusia. Namun setelah invasi 2022, mereka dengan tegas mengutuk rezim Putin dan setuju untuk memberikan bantuan sesuai kemampuan militer dan finansial masing-masing (Riy, 2022).

Studi akademik menunjukkan bahwa dukungan untuk Ukraina oleh UE dan negara-negara anggotanya meningkat secara masif setelah invasi skala penuh 2022. Namun tingkat dukungan bilateral, biaya yang dikeluarkan, dan keterlibatan dalam kebijakan tingkat Uni sangat bervariasi (Krotz dkk., 2025). Negara-negara Eropa Selatan bahkan bergabung dalam pertemuan "Ramstein" yang mengoordinasikan bantuan militer untuk Ukraina (OPERATION UKRAINE, 2024).

Di tengah gelombang respons Eropa yang didominasi oleh negara-negara anggota NATO dan Uni Eropa, Swiss, negara yang selama berabad-abad mendefinisikan dirinya melalui prinsip netralitas abadi, mengambil keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Dalam menghadapi invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022, Swiss mengambil langkah signifikan dengan mengadopsi sanksi Uni Eropa terhadap Rusia, sebuah tindakan yang memicu debat apakah hal ini menandai reinterpretasi, adaptasi, atau bahkan penyimpangan dari prinsip

netralitas tradisional (Bruni Kaufmann, 2022; Fox, 2022; Reuters, 2022a). Jika dalam krisis-krisis sebelumnya Swiss masih mampu mempertahankan jarak yang sama dari pihak-pihak yang berkonflik, perang di Ukraina menghadirkan tantangan eksistensial yang berbeda.

Netralitas Swiss mengalami perubahan. Swiss memutuskan untuk mengadopsi secara penuh sanksi ekonomi Uni Eropa terhadap Rusia dan Belarus, termasuk pembekuan aset, larangan perjalanan, serta pembatasan di sektor keuangan dan perdagangan (Serhan, 2023) (Reuters, 2022b). Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam kebijakan netralitas Swiss, karena sebelumnya Swiss cenderung menghindari partisipasi dalam sanksi yang tidak diberlakukan oleh PBB. Selain itu, Swiss menolak permintaan dari negara-negara seperti Jerman dan Denmark untuk mengekspor ulang senjata buatan Swiss ke Ukraina, dengan alasan mempertahankan netralitasnya. Namun, keputusan ini juga menimbulkan kritik dan tekanan internasional (KEATEN, 2023).

Media-media terkemuka dunia kompak memberitakan tindakan tersebut sebagai "*break with the past*" dan penyimpangan tajam (*sharp deviatio*n) dari kebijakan tradisional Swiss yang selama berabad-abad enggan menjatuhkan sanksi sepihak terhadap negara yang berkonflik (Jones, 2022). Reuters dalam laporannya menegaskan bahwa Swiss yang netral telah bergabung dengan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia, sebuah tindakan yang melambangkan perubahan radikal dari kebijakan masa lalunya (Reuters, 2022; Swiss Federal Authorities, 2022). Dalam waktu empat hari setelah invasi, tepatnya pada 28 Februari 2022, Dewan Federal Swiss mengambil keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya: mengadopsi seluruh paket sanksi Uni Eropa terhadap Rusia, termasuk pembekuan aset pejabat tinggi Rusia dan penutupan wilayah udara Swiss untuk pesawat-pesawat Rusia (Reuters, 2022). BBC dalam analisisnya beberapa bulan kemudian menyebutkan bahwa perang di Ukraina telah memaksa warga Swiss untuk mempertanyakan posisi netral yang telah dipertahankan selama berabad-abad, terutama ketika nilai-nilai demokrasi liberal Eropa dirasa terancam oleh agresi otoritarian Rusia (Imogen Foulkes, 2022). Peristiwa ini

menjadi sorotan utama media internasional yang melihatnya sebagai fenomena luar biasa dalam politik luar negeri Swiss.

Tindakan luar biasa ini kemudian memicu reaksi keras, terutama dari pihak yang menjadi target sanksi. Pemerintah Rusia secara resmi mempertanyakan status netral Swiss. Ivan Nechayev, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, pada Agustus 2022 menegaskan bahwa Swiss telah kehilangan statusnya sebagai negara netral. Pernyataan ini disampaikan saat Rusia menolak rencana Swiss untuk mewakili kepentingan Ukraina di Moskow. "Bern telah bergabung dengan sanksi Barat yang ilegal terhadap Rusia," tegas Nechayev, sehingga tidak dapat lagi bertindak sebagai mediator atau perwakilan (Al Jazeera, 2022). Kritik serupa juga dilontarkan oleh para pengamat dan politisi pro-Kremlin. Yuri Svetov, seorang analis politik Rusia, menyindir tindakan Swiss sebagai bentuk kemunafikan tertinggi. Ia menyebut bahwa netralitas yang dideklarasikan Swiss saat ini berarti mematuhi apa yang diminta oleh Amerika Serikat dan NATO, namun menolak jika prinsip yang sama diterapkan terhadap Rusia. Svetov mengkritik partisipasi Swiss dalam apa yang disebutnya sebagai "military Schengen" (Servettaz, 2024). Kritik dari tokoh-tokoh ini menunjukkan bahwa persepsi internasional terhadap netralitas Swiss telah berubah akibat krisis ini.

Pemerintah Swiss menyatakan bahwa adopsi kebijakan untuk memberikan sanksi ini tidak melanggar netralitas, karena tidak memberikan dukungan militer kepada pihak mana pun dalam konflik. Namun, keputusan ini memicu perdebatan di dalam negeri dan kritik dari Rusia, yang menganggap Swiss telah kehilangan status netralnya (Federal Department of Foreign Affairs, 2022a) (Servettaz, 2024).

Situasi ini menciptakan paradoks yang unik. Swiss secara militer tetap netral (dengan menolak pengiriman senjata ke zona konflik), namun secara ekonomi dan politik telah menjadi bagian dari koalisi Barat yang menentang Rusia. Keputusan Swiss untuk mengadopsi secara penuh sanksi ekonomi Uni Eropa terhadap Rusia menjadi bukti akan hal tersebut. Padahal, Swiss yang merupakan negara netral bukan merupakan anggota dari Uni Eropa. Krisis Perang Rusia-Ukraina 2022 tampaknya membawa netralitas Swiss yang selama berabad-

abad dijaga dengan konsisten ternyata tidak kebal terhadap tekanan geopolitik dan ketergantungan struktural pada Uni Eropa (Fox, 2022).

Keputusan Swiss untuk mengadopsi secara penuh sanksi ekonomi Uni Eropa terhadap Rusia merupakan hal yang mengejutkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apa alasan dibalik keputusan tersebut. Penelitian ini akan berusaha mencari tahu apa saja faktor penyebab Swiss mengadopsi keseluruhan sanksi ekonomi Uni Eropa untuk Rusia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "mengapa Swiss mengadopsi secara penuh sanksi ekonomi Uni Eropa terhadap Rusia pada masa perang Rusia-Ukraina 2022?"

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Menganalisis faktor yang mempengaruhi pengadopsian secara penuh atas sanksi Uni Eropa terhadap Rusia yang dilakukan oleh Swiss pada masa Perang Rusia-Ukraina 2022 menggunakan perspektif institusionalisme historis.
2. Menyediakan analisis empiris yang dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya mengenai netralitas Swiss.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menjelaskan relevansi teori institusionalisme liberal dalam memahami dinamika kebijakan luar negeri Swiss.

2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi adopsi sanksi Uni Eropa yang dilakukan oleh Swiss pada masa perang Rusia-Ukraina 2022 dengan menggunakan perspektif institusionalisme historis.
3. Menganalisis faktor yang mempengaruhi adopsi sanksi Uni Eropa yang dilakukan oleh Swiss pada masa perang Rusia-Ukraina 2022 dengan menggunakan konsep *path dependence* dan *critical juncture*.
4. Menganalisis bentuk perubahan netralitas Swiss dari netralitas tradisional menuju kooperatif.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Memberikan kontribusi terhadap kajian Hubungan Internasional, khususnya mengenai perubahan kebijakan luar negeri negara netral dalam menghadapi perubahan lingkungan internasional.
2. Memperkaya kajian mengenai perspektif institusionalisme, terutama dalam menjelaskan bagaimana institusi yang telah terbentuk secara historis dapat mengalami perubahan ketika menghadapi *critical juncture* atau momen kritis yang menyebabkan perubahan lingkungan yang signifikan.
3. Memberikan pemahaman mengenai hubungan antara *path dependence* dan perubahan institusional, dengan menunjukkan bagaimana sejarah dan institusionalisasi netralitas Swiss memengaruhi respons Swiss terhadap perang Rusia–Ukraina 2022.
4. Memberikan perspektif mengenai transformasi netralitas, yaitu bahwa perubahan pelaksanaan netralitas tidak selalu berarti penghapusan prinsip netralitas, tetapi dapat berupa proses adaptasi institusional menuju bentuk netralitas yang lebih kooperatif dengan institusi lain, yaitu Uni Eropa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Memberikan pemahaman bagi pembuat kebijakan mengenai bagaimana negara netral dapat menyesuaikan kebijakan luar negerinya dalam menghadapi perubahan lingkungan keamanan internasional tanpa sepenuhnya meninggalkan prinsip netralitas.
2. Memberikan gambaran mengenai pengalaman Swiss dalam menyeimbangkan prinsip netralitas dengan kepentingan untuk merespons pelanggaran hukum internasional dan persoalan kemanusiaan yang muncul akibat perang Rusia–Ukraina 2022.
3. Menjadi referensi bagi negara-negara yang menerapkan kebijakan netralitas dalam memahami kemungkinan bentuk adaptasi kebijakan netral ketika menghadapi konflik internasional dan tekanan lingkungan eksternal.
4. Memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas netralitas Swiss, hubungan Swiss–Uni Eropa, perubahan kebijakan luar negeri, maupun perubahan institusional dalam Hubungan Internasional.
5. Menambah pemahaman mengenai implikasi hubungan dengan Uni Eropa bagi negara non-anggota, khususnya bagaimana kedekatan institusional dan normatif dengan Uni Eropa dapat memengaruhi perubahan kebijakan suatu negara tanpa adanya keanggotaan formal.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Kajian akademik yang membahas tentang netralitas Swiss telah banyak dipublikasikan dalam berbagai bentuk dan rentang waktu yang beragam. Salah satu contoh karya tulis tersebut adalah "*Neutrality After the Russian Invasion of Ukraine: The Example of Switzerland and Some Lessons for Ukraine"* karya Thomas Greminger dan Jean-Marc Rickli (2023). Artikel ini membahas tentang evolusi netralitas Swiss dari yang semula klasik dan bersifat pasif kemudian berubah menjadi sebuah praktik yang fleksibel dan kooperatif. Dalam tulisan ini

disebutkan bahwa meskipun ada perdebatan internal dalam negeri, mayoritas masyarakat domestik tetap mendukung untuk mempertahankan prinsip netralitas Swiss meski ada perubahan dalam praktiknya. Mayoritas penduduk Swiss setuju dengan keputusan untuk memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia sebagaimana yang dilakukan oleh UE. Mereka menganggap *cooperative neutrality* sebagai cara menjaga kredibilitas Swiss di dunia yang semakin multipolar, sekaligus mempertahankan identitas netral. Ada perdebatan internal yang muncul mengenai apakah "netral tetapi kooperatif" benar-benar netral dalam arti klasik. Artikel ini berakhir pada kesimpulan bahwa Swiss menunjukkan bahwa netralitas bisa fleksibel, dinamis, dan tetap menjadi alat diplomasi serta keamanan di era multipolar (Greminger & Rickli, 2023).

Beberapa tulisan lain juga menyebutkan mengenai evolusi atas praktik dari netralitas Swiss ini, diantaranya adalah *"The Evolution of Swiss Neutrality: From Antiquity to Modern Challenges"* oleh Douglas C. Youvan (2024) dan *"An Image Of The Evolution Of Switzerland's Neutrality Policy"* karya Ileana Gentilia Metea (2021). Kedua tulisan tersebut menjelaskan bahwa praktik netralitas Swiss telah berubah dari klasik menjadi fleksibel, dinamis, dan relevan. Artikel "The Evolution of Swiss Neutrality: From Antiquity to Modern Challenges" karya Douglas C. Youvan memberikan kajian komprehensif tentang perjalanan panjang netralitas Swiss dari masa awal Konfederasi hingga tantangan geopolitik abad ke-21. Dari artikel ini, tampak bahwa netralitas Swiss terus mengalami evolusi dari waktu ke waktu. Perubahan selalu dilakukan untuk meng-counter momen krisis yang terjadi pada masa itu. Youfan menyimpulkan bahwa netralitas Swiss merupakan strategi adaptif dari kebutuhan bertahan hidup di abad pertengahan hingga instrumen diplomasi global. Netralitas ini akan tetap mempertahankan prinsip inti, namun dengan ekspresi baru yang menyesuaikan realitas globalisasi, ancaman transnasional, dan tuntutan moral internasional (Youvan, 2024).

Artikel "*An Image of the Evolution of Switzerland's Neutrality Policy*" membahas perkembangan, makna, dan kontroversi seputar kebijakan netralitas Swiss dari masa lalu hingga konteks modern. Metea menyimpukan bahwa netralitas Swiss bukanlah hal yang bersifat absolut, melainkan alat politik yang

fleksibel. Sejarawan Hans-Ulrich Jost menilai netralitas sering digunakan secara oportunistik, misalnya dalam perdagangan senjata atau perbankan. Konsep "active neutrality" diperkenalkan, tetapi diperdebatkan karena dianggap bisa merusak kredibilitas netralitas. Kritik moral muncul karena netralitas kadang dianggap sebagai alibi untuk kepentingan ekonomi, bukan semata demi perdamaian. Meski menghadapi tantangan moral dan geopolitik, netralitas tetap menjadi identitas penting Swiss dan dianggap berperan menjaga stabilitas internasional (Metea, 2021).

Tulisan Dan A. Cohen (2022) yang berjudul *"Evolving Swiss Neutrality: Foreign Policy, Identity, and a Changing World"* juga setuju bahwa ada perubahan atau evolusi dari praktik netralitas Swiss. Tulisan ini menjelaskan sejauh mana netralitas Swiss berubah jika dilihat dari sisi ekonomi, politik, dan sosialnya. Penelitian itu menyimpulkan bahwa meskipun netralitas tampak ditinggalkan, Swiss tetap mempertahankan netralitasnya secara sah. Keputusan Swiss untuk ikut sanksi Rusia bukan karena paksaan ekonomi ataupun keberpihakan dengan barat, melainkan pilihan politik dan normatif untuk mendukung sistem hukum internasional. Netralitas Swiss kini adalah konsep dinamis, bukan pasif. Namun perlu ada perhatian khusus untuk menyeimbangkan dukungan terhadap tatanan liberal internasional dengan mempertahankan identitas netral. Cohen menegaskan bahwa netralitas Swiss sedang berevolusi: dari sekadar strategi bertahan hidup menjadi simbol identitas nasional yang harus terus disesuaikan dengan tekanan ekonomi, politik, dan sosial dunia modern.

Literatur lain berjudul *"Swiss Neutrality: How Classical Is It Today?"* oleh Jürg Martin Gabriel (2018) juga memberikan pendapat yang mirip, bahwa terjadi perubahan dari bentuk klasik yang kaku menjadi bentuk modern yang fleksibel. Karya ini menyoroti netralitas Swiss yang tidak lagi absolut dan tekanan geopolitik membuat Swiss harus menyesuaikan praktik netralitasnya. Artikel 9 menekankan hubungan antara kedaulatan dan interdependensi. Netralitas yang dipandang sebagai bentuk kedaulatan mulai terkikis karena munculnya interdependensi ekonomi dan politik antara Swiss dengan UE, PBB dan organisasi internasional lainnya. tulisan ini ditutup dengan kesimpulan bahwa hubungan

simbiotik antara kedaulatan dan netralitas bergeser: dari saling memperkuat menjadi saling melemahkan (Gabriel, 2018).

Argumen serupa juga dituliskan oleh Fox (2022) dalam artikel berjudul *"Swiss Neutrality: From Policy to Doctrine"*. Disini Fox menuliskan bahwa netralitas bukan lagi konsep tunggal, atau berada pada posisi moral absolut, namun telah bergeser menjadi doktrin fleksibel yang harus ditafsirkan cara pelaksanaannya untuk disesuaikan dengan perkembangan jaman, teknologi, dan norma global. Artikel ini membahas bagaimana netralitas Swiss mengalami transformasi dari sekadar kebijakan praktis menjadi sebuah doktrin yang harus ditafsirkan ulang dalam konteks dunia modern. Netralitas tidak lagi dianggap sebagai posisi moral absolut, melainkan kerangka kerja untuk menimbang opsi kebijakan. Selama masih ada perang dan konflik, netralitas tetap relevan sebagai payung untuk diplomasi, mediasi, dan "good offices." Namun, kredibilitasnya bergantung pada kemampuan Swiss menyeimbangkan kepentingan nasional, tuntutan moral, dan konsensus internasional (Fox, 2022).

Beranjak dari tulisan-tulisan sebelumnya yang berfokus pada apakah netralitas Swiss masih masih dianggap netral atau tidak, tulisan berjudul "*Transformation Of Switzerland's Contemporary Foreign Policy During The Russia-Ukraine War"* oleh Yergakova dkk., (2023) memberikan pendekatan yang unik berupa pendekatan sistemik. Disini dijelaskan mengenai bagaimana netralitas klasik mengalami tekanan dan penyesuaian, kemudian berintegrasi ke sistem regional dan Eropa. Yergakova menjelaskan bagaimana dinamika hubungan antara Swiss-Uni Eropa dan Swiss-NATO seiring berjalannya waktu menjadi semakin erat, tanpa menanggalkan sikap netralnya sebagai bentuk mempertahankan kedaulatan. Perubahan ini mencerminkan realitas geopolitik baru dimana netralitas klasik tidak lagi cukup. Swiss harus menyeimbangkan antara mempertahankan identitas historis dengan tuntutan keamanan kolektif (Yergakova dkk., 2023).

Selanjutnya, tesis berjudul "Navigating Swiss Neutrality Switzerland,the UN and Right-Wing Discourse on Neutrality: 2002-2022" karya Kathrin Plüss (2023) membahas evolusi perdebatan publik tentang netralitas Swiss yang sejak

bergabung dengan PBB pada tahun 2002, mulai memperhalus definisi netralitasnya. Tesis ini juga menyoroti kritik terbaru terkait perang Rusia–Ukraina. Fokus utamanya adalah bagaimana Partai Rakyat Swiss (SVP), sebagai representasi sayap kanan, mengubah pendekatan mereka terhadap isu netralitas, dari sekadar reaktif menjadi proaktif, dengan upaya untuk menanamkan definisi netralitas versi mereka ke dalam konstitusi. Ditekankan bahwa perlunya definisi netralitas yang komprehensif dan kokoh untuk membentuk wacana publik serta keputusan kebijakan (Plüss, 2023).

Tulisan-tulisan diatas telah memberikan berbagai penjelasan mengenai netralitas Swiss, terutama penjelasan mengenai apakah praktik netralitas Swiss sekarang ini masih dianggap netral atau tidak, hingga peran partai politik dalam negeri dalam mendefinisikan kembali arti netralitas bagi Swiss. Namun demikian, diantara literatur tersebut, belum ada yang secara khusus menjelaskan faktor yang mempengaruhi Swiss untuk mengadopsi secara penuh atas sanksi ekonomi Uni Eropa terhadap Rusia menggunakan perspektif institusionalisme historis. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas hal tersebut.

1.5.2 Kerangka Teori

Institusionalisme liberal merupakan salah satu aliran dari paradigma liberalisme. Berbeda dengan realisme yang memandang tatanan global yang anarki sebagai tempat penuh konflik, liberalisme percaya bahwa aktor internasional dapat bekerja sama satu sama lain untuk menghindari konflik. Realisme dianggap terlalu pesimis dan hanya menekankan pada konflik kepentingan. Liberalisme berpikir bahwa kepentingan aktor dapat dicapai dengan lebih baik jika aktor saling bekerja sama. Gagasan utama lain dari liberalisme adalah interdependensi ekonomi. Hubungan interdependensi yang tercipta dari hubungan ekonomi lintas negara memperkuat gagasan bahwa konflik dan perang akan terhindar, menimbang kerugian ekonomi besar yang akan ditanggung. Ada tiga aliran besar dalam paradigma liberalisme: republikan, interdependensi, dan institusionalisme (Mohamad Rosyidin, 2022). Ketiganya memiliki fokus pembahasan yang berbeda. Penjelasan selanjutnya akan menekankan pada aliran

liberalisme institusionalisme, terutama institusionalisme historis, yang merupakan kacamata untuk membahas persoalan dalam penelitian ini.

Liberalisme institusionalis, yang akan digunakan pada penelitian ini, (selanjutnya juga akan disebut institusionalisme) atau bisa juga disebut neoliberal-institusionalisme, berasumsi bahwa meskipun bentuk tatanan dunia internasional memang anarki, kerja sama antar aktor tetap dapat dilakukan melalui rezim internasional (Mohamad Rosyidin, 2022). Institusionalisme menekankan pada struktur kerja sama melalui institusi internasional yang berperan penting dalam mengurangi ketidakpastian, membangun kepercayaan, dam memfasilitasi kerja sama antarnegara (Dunne dkk., 2013).

Liberalisme institusionalis berakar pada keyakinan bahwa institusi memiliki peran sentral dalam membentuk perilaku aktor politik (Mohamad Rosyidin, 2022). Liberalisme institusionalis fokus pada gagasan interdependensi kompleks. Robert Keohane dan Joseph Nye dalam buku *Power and Interdependence* menuliskan bahwa ada tiga karakteristik utama dari interdependensi kompleks. Pertama, adanya banyak saluran yang memungkinkan interaksi antar aktor lintas negara, yang dapat meningkatkan hubungan mereka. Kedua, tidak adanya hierarki isu dalam hubungan antar negara. Artinya isu politik bukan isu yang paling dominan. Ketiga, kekuatan militer tidak digunakan oleh aktor ketika kondisi interdependensi kompleks berlangsung (Keohane & Nye, 2012).

Dalam liberalisme institusionalis, ada tiga pendekatan yang berkembang selama masa 1960-an hingga 1970-an, yaitu institusionalisme pilihan rasional atau institusionalisme historis, *rational choice theory*, dan institusionalisme sosiologis. Penjelasan selanjutnya akan berfokus pada pendekatan institusionalisme historis dan sosiologis yang merupakan pendekatan yang akan dipakai dalam penelitian ini.

Institusionalime historis menekankan bahwa institusi membentuk jalur sejarah politik dengan menciptakan legasi, membatasi pilihan, dan mendistribusikan kekuasaan secara tidak merata (Hall & Taylor, 1996). Perubahan biasanya terjadi pada momen kritis, dan bukan secara bertahap . Institusionalime

historis menekankan pada bagaimana sebuah institusi berkembang dari sisi historisnya dan bagaimana sejarah membentuk perilaku serta preferensi aktor. Rekam jejak atas hal-hal yang dilakukan oleh aktor dari waktu ke waktu akan menimbulkan *path dependence* atau ketergantungan jalur (Hall & Taylor, 1996). Artinya, keputusan masa lalu akan membatasi atau mempengaruhi pilihan masa kini. Menurut Hall & Taylor, institusionalisme historis memandang organisasi institusional dari sistem pemerintahan atau ekonomi politik sebagai faktor utama yang membentuk perilaku kolektif dan menghasilkan keluaran tertentu yang khas (*distinctive outcomes*). Secara umum, institusionalisme historis memang mengasosiasikan institusi dengan organisasi dan aturan atau konvensi yang disebarluaskan oleh organisasi formal. Disini, institusi didefinisikan sebagai prosedur, rutinitas, norma, dan konvensi baik formal atau informal yang tertanam dalam struktur organisasi ekonomi politik (Hall & Taylor, 1996).

Hall dan Taylor juga mengatakan bahwa ada empat ciri khusus institusionalisme historis. Ciri pertama, institusionalisme historis cenderung mengonseptualisasikan hubungan antara institusi dan perilaku individu dalam istilah yang relatif luas. Institusionalisme historis melihat hubungan antara institusi dan individu melalui dua sudut pandang, kalkulus dan kultural. Meskipun demikian, para peneliti tidak terpaku pada satu pendekatan saja, melainkan menggabungkan berbagai sudut pandang untuk memahami hubungan antara institusi dan tindakan.

Perspektif kalkulus berasumsi bahwa dalam perilakunya, individu selalu menghitung dan menimbang untung-rugi dari keputusan yang diambil. Ketika dihadapkan dengan suatu masalah, individu akan berusaha memaksimalkan pencapaian, bertindak secara strategis untuk mendapatkan manfaat maksimum demi kepentingannya. Dalam perspektif ini, institusi berperan untuk memberi aturan main, membentuk cara berpikir, nilai, dan kebiasaan (Hall & Taylor, 1996). Institusi memberikan panduan atas bagaimana aktor seharusnya bertindak. Hal ini juga dapat memberikan kepastian atas bagaimana aktor lain akan bertindak, karena mereka memiliki aturan main yang sama. Dengan kata lain, perspektif kalkulus menekankan bahwa setiap orang tidak hanya memikirkan tindakannya

sendiri, tapi juga memperhitungkan bagaimana orang lain akan bertindak (Hall & Taylor, 1996). Aktor akan terus mempertahankan institusi karena mereka sadar bahwa institusi menghilangkan kekhawatiran atas ketidakpastian mengenai bagaimana aktor lain bertindak. Aktor sadar bahwa mengikuti aturan (institusi) lebih menguntungkan daripada melanggar.

Disisi lain, perspektif kultural berasumsi bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh *worldview*, budaya, identitas, kebiasaan, dan interpretasi situasi, tanpa mengabaikan rasionalitas individu tersebut. Artinya, tanpa menolak bahwa perilaku manusia bisa rasional dan bertujuan, pendekatan ini menyoroti sejauh mana individu cenderung menggunakan rutinitas yang sudah ada atau pola perilaku yang familiar untuk mencapai tujuan mereka (Hall & Taylor, 1996). Disini, individu bergerak sebagai pencari kepuasan, bukan sosok yang penuh perhitungan. Keputusan aktor untuk melakukan suatu tindakan lebih bergantung pada bagaimana seseorang menafsirkan situasi, bukan semata-mata pada perhitungan untung-rugi. Dari perspektif ini, institusi dipandang sebagai penyedia kerangka moral dan cara berpikir bagi individu yang menjadi acuan interpretasi serta sebagai filter untuk menafsirkan atau memahami situasi dan membentuk cara aktor bertindak (Hall & Taylor, 1996). Institusi yang telah mengasosiasikan diri sebagai sebuah aturan moral, seiring waktu akan tersedimentasi menjadi sesuatu hal yang bersifat konvensional, wajar, dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Oleh karena itu, institusi sulit diubah dan justru membentuk kerangka pilihan reformasi yang mungkin dibuat oleh individu (Hall & Taylor, 1996).

Ciri kedua dari institusionalisme historis yaitu menekankan adanya kekuasaan asimetris terkait dengan operasional dan perkembangan institusi. Institusi dipahami sebagai mekanisme yang mendistribusikan kekuasaan secara tidak merata, sehingga hasil politik sering kali mencerminkan kemenangan sebagian kelompok dan kekalahan kelompok lain. Institusionalisme historis tidak berasumsi bahwa dunia politik terdiri dari individu-individu yang bebas berkontrak, melainkan dunia di mana institusi memberi sebagian kelompok akses lebih besar ke proses pengambilan keputusan (Hall & Taylor, 1996). Fokusnya bukan pada apakah hasil kebijakan membuat semua orang lebih baik, tetapi pada

bagaimana ada kelompok yang diuntungkan dan ada yang dirugikan (Hall & Taylor, 1996).

Ciri selanjutnya adalah kecenderungan untuk memiliki pandangan tentang perkembangan institusi yang menekankan *path dependence* dan konsekuensi yang tidak disengaja serta hanya akan berubah jika mengalami *critical junctures*, yaitu momen ketika terjadi perubahan institusional yang substansial sehingga menciptakan titik percabangan dari mana perkembangan sejarah bergerak ke jalur baru (Hall & Taylor, 1996). *Critical junctures* adalah periode singkat yang memutus kontinuitas lama dan membuka arah perkembangan baru yang berbeda.

Ciri yang terakhir adalah sangat memperhatikan upaya mengintegrasikan analisis institusional dengan kontribusi faktor lain, seperti ide dan faktor sosial-ekonomi, yang dapat memengaruhi hasil politik. Institusionalisme historis tidak melihat institusi sebagai faktor tunggal, melainkan bagian dari rantai kausal yang juga mencakup ide, keyakinan, dan kondisi sosial-ekonomi (Hall & Taylor, 1996). Politik bukan hanya soal aturan dan lembaga, tapi juga soal ekonomi dan gagasan yang berkembang di dalam masyarakat.

1.5.3 Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa netralitas merupakan institusi yang telah berkembang secara historis dalam kebijakan luar negeri Swiss. Sebagai institusi yang telah dipertahankan dalam jangka waktu panjang, netralitas membentuk pola kebijakan yang memengaruhi sikap Swiss terhadap konflik internasional. Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui konsep *path dependence*, yaitu keadaan ketika keputusan dan pola kelembagaan yang terbentuk pada masa lalu memengaruhi pilihan kebijakan pada masa berikutnya.

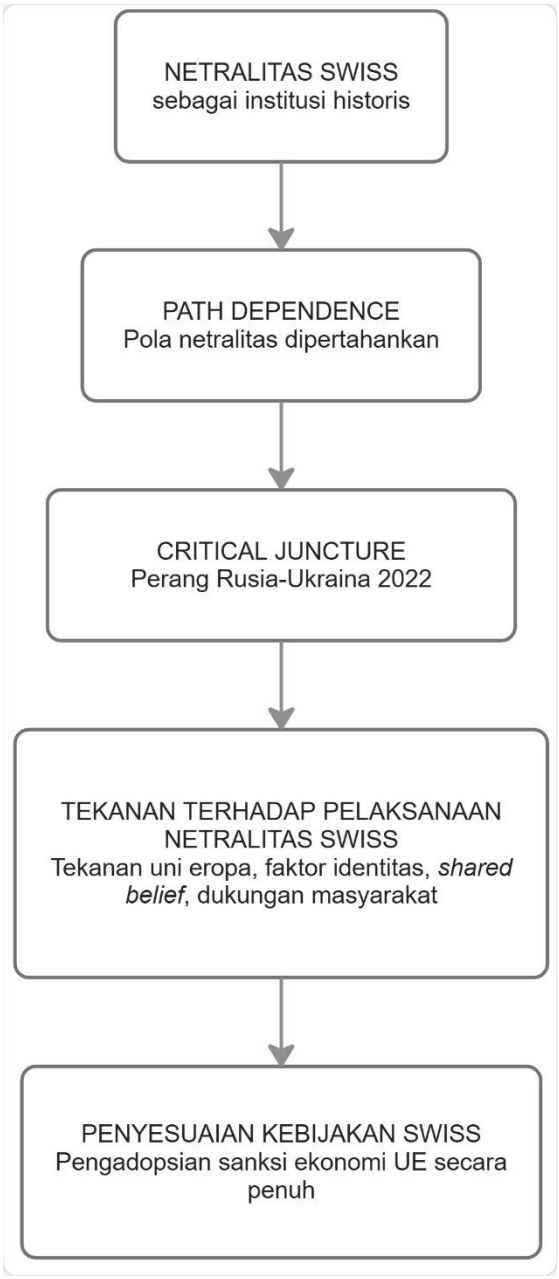
Pola tersebut kemudian menghadapi perubahan ketika Perang Rusia-Ukraina terjadi pada tahun 2022. Invasi Rusia terhadap Ukraina menyebabkan perubahan besar dalam lingkungan keamanan Eropa dan mendorong Uni Eropa untuk menerapkan berbagai sanksi ekonomi terhadap Rusia. Dalam perspektif institusionalisme historis, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai *critical*

juncture, yaitu suatu kondisi ketika perubahan besar menciptakan tekanan terhadap pola institusional yang telah berlangsung dan membuka peluang bagi munculnya pilihan kebijakan baru.

Perubahan lingkungan internasional tersebut kemudian memberikan tekanan terhadap pelaksanaan netralitas Swiss. Swiss menghadapi kondisi ketika prinsip netralitas yang telah dipertahankan secara historis harus berhadapan dengan perkembangan keamanan dan politik Eropa. Dalam kondisi tersebut, Swiss melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan netralitasnya dengan mengadopsi sanksi ekonomi yang diterapkan oleh Uni Eropa terhadap Rusia.

Keputusan tersebut juga dapat dianalisis melalui karakteristik kekuasaan asimetris dalam institusionalisme historis. Penerapan sanksi ekonomi Swiss memberikan dampak yang berbeda terhadap aktor yang terlibat. Swiss juga mendapat dukungan dari warganya dalam penerapan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Dengan demikian, keputusan Swiss untuk mengadopsi sanksi ekonomi Uni Eropa menunjukkan adanya pergeseran dalam pelaksanaan institusi netralitas yang sebelumnya telah terbentuk melalui proses historis.

Berdasarkan alur tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif institusionalisme historis untuk menjelaskan mengapa Swiss mengambil keputusan untuk mengadopsi secara penuh sanksi ekonomi Uni Eropa terhadap Rusia pada Perang Rusia-Ukraina 2022. Analisis dilakukan dengan melihat hubungan antara keberlanjutan institusi netralitas melalui *path dependence*, perubahan kondisi yang muncul pada *critical juncture*, kontribusi faktor sosio-ekonomi, serta distribusi kekuasaan yang tidak seimbang dalam hubungan institusional yang memengaruhi keputusan Swiss.



Bagan 1 Kerangka berpikir

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1. Institusi

Menurut Hall & Taylor (1996) institusi didefinisikan sebagai aturan formal, prosedur, atau norma, dan kerangka makna (*frames of meaning)* yang membimbing tindakan manusia. Institusi tidak hanya diartikan sebagai aturan formal atau prosedur administratif, melainkan juga mencakup sistem simbol (e.g. bendera negara, lambang negara), skrip kognitif (e.g. code of conduct), dan kerangka moral yang membentuk makna serta identitas sosial (Hall & Taylor, 1996).

Ciri-ciri institusi menurut Hall & Taylor (1996) diantaranya adalah berbentuk norma atau aturan formal seperti hukum, undang-undang, perjanjian, ataupun prosedur birokrasi seperti *standard operating procedures* dalam lembaga pemerintahan. Selain itu institusi juga memiliki bentuk informal seperti konvensi, adat kebiasaan, dan pola hubungan tertentu. Institusi seringkali terlembaga atau tertanam dalam struktur organisasi atau tatanan sosial. Institusi mengarahkan dan membatasi perilaku aktor yang terikat karena biasanya nilai-nilai dalam institusi tersebut telah terinternalisasi dalam diri aktor tersebut. Nilai atau institusi itu sendiri cenderung bertahan lama sehingga membentuk ketergantungan pada jalur (*path dependence*). Hall & Taylor juga menyebutkan bahwa *path dependence* seringkali membawa dampak yang tidak terduga. Keputusan yang diambil saat ini mungkin memiliki dampak dimasa depan yang tidak dapat diprediksi.

Institutionalis historis memaknai institusi sebagai aturan dan praktik yang membentuk perilaku aktor politik/ekonomi melalui sejarah dan struktur organisasi. Institutionalis historis juga menekankan bahwa institusi tidak hanya mengatur pilihan aktor, tetapi juga membentuk preferensi dan perilaku melalui proses historis (*path dependence*).

2. Path Dependence

Institusionalisme historis melihat perkembangan sosial sebagai sesuatu yang bergantung pada jalur sejarah (*path dependence*) dimana langkah-langkah yang diambil oleh sebuah institusi dimasa lalu kemudian menjadi faktor utama yang membentuk langkah dimasa depan (Hall & Taylor, 1996).

Menurut Pierson (2000) *path dependence* merupakan ketergantungan pada jalur yang menekankan pada pola urutan waktu dan konsekuensi yang terjadi karenanya (Pierson, 2000). Konsekuensi ini tidak selalu sesuai dengan prediksi aktor ketika suatu kebijakan atau langkah diambil di masa lalu. Konsekuensi ini dapat berupa sesuatu yang sama sekali tidak terpikirkan sebelumnya. Sebagai contoh, setelah Perang Dunia II, Jepang mengembangkan sistem *lifetime employment* dan serikat pekerja berbasis perusahaan dimana karyawan dapat bekerja seumur hidup di satu perusahaan tersebut. Pola sistem yang sama terus dilakukan hingga menjadi praktik adat kebiasaan yang *taken for granted.* Pola inilah yang disebut sebagai *path dependence. Path dependence* terbentuk dari urutan (*sequence*) peristiwa yang terjadi terus-menerus dan dengan waktu (*timing*) peristiwa historis yang mengunci jalur perkembangan institusi (Fioretos, 2011).

3. Critical Juncture

Dalam pola *path dependence* yang berjalan dengan tetap, sesekali muncul peristiwa yang mempengaruhi jalan yang biasanya diambil oleh kosntitusi. Banyak penganut institusionalisme historis membagi alur peristiwa sejarah ke dalam periode kontinuitas yang sesekali diselingi oleh *critical junctures.* Menurut Hall & Taylor (1996) *critical junctures* adalah momen ketika terjadi perubahan institusional yang substansial sehingga menciptakan sebuah ‘titik percabangan’ yang memutus kontinuitas lama dan membuka arah perkembangan baru yang berbeda, dimana perkembangan sejarah bergerak ke jalur baru (Hall & Taylor, 1996).

Critical juncture atau momen/titik kritis diartikan sebagai momen ketidakpastian mengenai masa depan suatu institusi memungkinkan peran dan pilihan politik untuk memainkan peran kausal yang menentukan dalam menetapkan institusi pada jalur perkembangan tertentu, yang kemudian bertahan dalam jangka waktu yang lama (Capoccia, 2015).

1.6.2 Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini menggunakan pendekatan Liberalisme Institusionalisme historis untuk menjelaskan mengapa Swiss mengadopsi sanksi ekonomi Uni Eropa untuk Rusia pada masa Perang Rusia-Ukraina 2022. Untuk memastikan konsep-konsep teoritis dapat dianalisis secara empiris, penelitian ini mengoperasionalisasikan tiga konsep utama, institusionalisme, *path dependence,* dan *critical juncture.*

1. Institusi

   Merujuk pada pengertian dari institusi menurut Peter A. Hall and Rosemary C. R. Taylor, dapat dikatakan bahwa Netralitas Swiss merupakan sebuah institusi. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian pada karakteristik Netralitas Swiss dengan ciri-ciri institusi.

   Dalam tulisan mereka yang berjudul "Political Science and the Three New Institutionalisms" institusi merupakan prosedur, rutinitas, norma, dan konvensi baik formal maupun informal yang tertanam dalam struktur organisasi atau ekonomi politik (Hall & Taylor, 1996). Netralitas Swiss lahir dari praktik kebiasaan jauh sebelum Kongres Wina 1815 dan kemudian diakui sebagai hukum internasional dalam kongres tersebut. Selanjutnya hukum netralitas juga dipertegas dalam Konvensi Den Haag 1907 dimana konvensi ini mengkodifikasi secara hukum internasional hak dan kewajiban negara netral. Swiss kemudian meratifikasi konvensi ini pada 1910. Artinya, Netralitas Swiss yang semula merupakan aturan informal berupa kebiasaan, berubah menjadi aturan formal yang diatur dalam hukum internasional.

Netralitas Swiss yang telah dipraktikkan selama berabad abad juga kemudian tertanam kedalam konstitusi dan kebijakan luar negeri Swiss—bukan sementara, namun telah menjadi bagian dari identitas Swiss. Netralitas Swiss berkembang dari sebuah pilihan kebijakan untuk bertahan hidup menjadi sebuah doktrin yang tertanam dalam identitas kebijakan luar negeri Swiss dan diakui secara internasional (Fox, 2022). Hal ini sesuai dengan ciri institusi dimana aturan harus tertanam dan terlembaga dalam struktur organisasi politik.

Konstitusi ini tertanam begitu dalam hingga menjadi pedoman perilaku Swiss sebagai aktor politik internasional. Konvensi Den Haag 1907 yang secara spesifik mengkodifikasi Netralitas Swiss, menjadi acuan hukum yang mempengaruhi dan membatasi keputusan yang diambil oleh Swiss. Netralitas juga memberikan batasan pada kebijakan luar negeri Swiss dengan cara mencegahnya untuk memihak dalam konflik, sekaligus memberi arah dengan memberikan peran sebagai mediator dan penyedia bantuan kemanusiaan (Schindler, 1998).

Sejak diakui di Kongres Wina 1815, dan bahkan jauh sebelum itu, netralitas menjadi prinsip dasar yang menstrukturkan orientasi kebijakan luar negeri Swiss. Netralitas tersebut berkembang menjadi norma yang dilestarikan terus-menerus dan direproduksi secara berulang dalam berbagai periode krisis, termasuk Perang Dunia dan Perang Dingin. Proses reproduksi inilah yang dalam kerangka institusionalisme historis membentuk jalur ketergantungan (*path dependence*), yaitu kecenderungan suatu institusi untuk mempertahankan pola yang telah terbentuk karena adanya biaya politik dan reputasional jika menyimpang dari jalur tersebut. Sayangnya, ketergantungan ini sering kali memberikan konsekuensi yang tidak disengaja dan tidak terprediksi oleh aktor dalam. Situasi dan kondisi di masa depan sering kali berbeda dan tidak terduga, memberikan institusi sebuah konsekuensi yang tidak terprediksi dan kebanyakan bersifat negatif.

2. *Path Dependence* (ketergantungan pada jalur)

Seperti yang telah dijelaskan pada paragraf diatas, prinsip Netralitas Swiss telah menjadi sebuah *path dependence*. Konsistensi Swiss untuk mengkonsolidasi identitasnya sebagai negara netral tercermin pada keteguhannya untuk bersikap netral pada masa-masa Perang Dunia I dan II, Perang Dingin, konflik Rusia-Ukraina 2014, dan berbagai konflik internasional lainnya.

Ketergantungan Swiss pada jalur netralitas dapat dilihat dari keputusan Swiss untuk tidak terlibat secara militer selama masa Perang Dunia I dan II. Pada masa itu, Swiss lebih memilih untuk bersikap defensif, mengerahkan militernya untuk menjaga perbatasan wilayah negaranya daripada bergabung ke pasukan perang (Fox, 2022). Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi serangan ke wilayahnya serta berfungsi sebagai sinyal yang jelas tentang komitmen Swiss untuk mempertahankan netralitasnya terhadap ancaman eksternal apa pun (Youvan, 2024) dan bersedia untuk menegakkan netralitas tersebut melalui kekerasan, jika memang diperlukan (Dreyer & Jesse, 2014). Hal ini sesuai dengan aturan dalam institusi netralitas Swiss yang tercantum dalam kodifikasi hak dan kewajiban negara netral.

Kepatuhan Swiss terhadap jalur netralitas juga dapat dilihat dari caranya membatasi perilaku politik luar negeri dan bahkan memposisikan diri sebagai *good offices* dalam panggung politik internasional. Swiss menyediakan ruang, fasilitas, dan mediasi diplomatik bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk tetap berkomunikasi, bernegosiasi, atau menyelesaikan masalah tanpa harus bertemu langsung di medan perang. Swiss mengambil peran sebagai pusat diplomasi serta bantuan kemanusiaan (Schindler, 1998).

Seperti yang telah dituliskan diatas, *path dependence* sering kali membawa konsekuensi yang tidak disengaja. Hal ini terjadi dalam institusi Netralitas Swiss pada Perang Dunia Kedua. Swiss mendapatkan kritik karena tetap berhubungan secara ekonomi dengan Nazi Jerman sementara

disaat yang bersamaan berusaha mempertahankan hubungan dengan kekuatan Sekutu (Youvan, 2024).

3. *Critical Juncture* (momen kritis)

Dalam penelitian ini, *critical juncture* digambarkan sebagai perang Rusia-Ukraina 2022 yang disebut-sebut sebagai *unorecedented military assault* oleh berbagai media. Serangan militer secara tiba-tiba yang terjadi pada 24 Februari 2022 ini terjadi dengan skala yang masif dimana Ukraina diserang dari tiga sisi perbatasannya, yaitu sebetah utara, timur, dan selatan. Serangan juga bersifat sistemis karena disinyalir bahwa terjadi penumpukan tentara Rusia disekitar Ukraina serta adanya penrgerakan kendaraan lapis baja dan kendaraan berat lainnya (Global Conflict Tracker, 2026). Skala dan sifat agresi dari serangan ini merupakan yang terbesar yang terjadi di Benua Eropa setelah berakhirnya Perang Dunia II. Hal ini menciptakan ketegangan dalam tatanan keamanan Eropa.

Kontribusi ide dan faktor sosio-ekonomi dioperasionalisasikan sebagai keinginan penduduk Swiss untuk mendukung pemberian sanksi ekonomi kepada Rusia sesuai dengan sanksi ekonomi UE ke Rusia.

Konsep	**Operasionalisasi**
Institusi	Netralitas Swiss, Uni Eropa
Path dependence	Konsistensi Swiss dalam melaksanakan Netralitas sejak 1815
Critical juncture	Perang Rusia-Ukraina 2022 yang merupakan *unprecedented military assault*

Tabel 1 Operasionalisasi konsep

1.7 Argumentasi Penelitian

Keputusan Swiss untuk mengadopsi secara penuh sanksi ekonomi Uni Eropa untuk Rusia pada masa Perang Rusia-Ukraina 2022 merupakan dipengaruhi oleh beberapa faktor pertimbangan, yaitu faktor identitas dan nilainya sebagai bagian dari negara Eropa, tekanan dari Uni Eropa dan kekhawatiran biaya politik jika tidak mengadopsi sanksi ekonomi secara penuh, dan dukungan warga negara Swiss untuk memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia. Fenomena ini dapat dikaji menggunakan pendekatan institusionalisme historis yang menekankan pada *path dependence* dan *critical juncture* sebuah institusi, yang dalam hal ini dilihat sebagai ketergantungan netralitas Swiss untuk tidak terlibat dalam konflik militer internasional dan munculnya momen kritis berupa Perang Rusia-Ukraina 2022 disebut-sebut sebagai *unprecedented military assault.* Netralitas Swiss sebagai sebuah institusi mengarahkan Swiss sebagai aktor untuk mendistribusikan netralitas secara tidak merata, dimana adopsi sanksi ekonomi Uni Eropa terhadap Rusia yang dilakukan oleh Swiss ini cenderung lebih menguntungkan Uni Eropa dibandingkan Rusia.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Proses berpikir dilakukan secara induktif. Hasil penelitian merupakan kesimpulan dari generalisasi temuan.

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian ini akan menjelaskan mengapa isu yang diangkat (adopsi penuh sanksi ekonomi UE untuk Rusia oleh Swiss) dapat terjadi. Oleh karena itu, penjelasan akan bersifat eksplanatif untuk mempertegas mengenai kausalitas dalam penelitian.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian ini merupakan tempat dimana objek penelitian diamati, tanpa peneliti perlu mengunjungi tempat tersebut. Oleh karena itu, penelitian dilakukan di Kota Semarang sebagai domisili penulis.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah negara Swiss sebagai aktor pembuat kebijakan luar negeri.

1.8.4 Jenis Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif karena penelitian akan bersifat menggambarkan dan menjelaskan dan bagaimana nilai netralitas Swiss mengalami pergeseran. Melalui data kualitatif, perbedaan norma yang terbentuk dan yang mempengaruhi tindakan suatu negara akan lebih mudah dianalisis.

1.8.5 Sumber Data

Data-data yang dikumpulkan untuk penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. Sumber primer akan didapat secara langsung oleh penulis melalui interpretasi langsung atas ungkapan tokoh publik, seperti Presiden Konfederasi Swiss (Ignazio Cassis, Alain Berzet) dan Juru bicara Uni Eropa untuk urusan Luar Negeri (Peter Starno), yang muncul melalui video resmi tanpa interferensi. Sedangkan data sekunder diambil dari penelitian sebelumnya, dokumen resmi seperti konvensi dan laporan parlemen, dokumen atau laporan resmi organisasi terkait (e.g. WTO, UE), dan artikel berita terpercaya seperti kanal berita resmi negara Swiss (Swissinfo).

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini akan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan membaca penelitian sebelumnya yang memiliki topik yang mirip, dokumen-dokumen laporan mengenai isu terkait, serta tulisan opini dari tokoh ahli.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*), yang dilakukan terhadap berbagai dokumen, artikel akademik, berita internasional, pernyataan resmi pemerintah Swiss, serta laporan dari lembaga internasional. Analisis dilakukan menggunakan pandangan dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014) tentang analisis data kualitatif dengan proses sebagai berikut (Feny Rita Fiantika dkk., 2022):

1. Kondensasi data

   Peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan kondisi Swiss ketika Perang Rusia-Ukraina 2022 terjadi dan kemungkinan-kemungkinan faktor penyebab pengadopsian sanksi ekonomi UE untuk Rusia oleh Swiss. Data yang telah diseleksi kemudian dikodekan dan dikategorikan agar data terorganisir.
2. Tampilan data (*data display*)

   Setelah data terkumpul dan terorganisir, data kemudian disajikan dalam struktur tertentu agar peneliti dapat melihat pola, hubungan, dan menarik kesimpulan. Tampilan dapat berupa *mindmap*, tabel, grafik, atau teks terstruktur.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

   Peneliti menafsirkan makna dari data yang sudah terkumpul, menemukan pola penjelasan, dan hubungan kausal dalam data. Kesimpulan kemudian diverifikasi melalui refleksi cepat (pemikiran kedua saat menulis), *peer review*, atau replikasi hasil pada kumpulan data lain. Hal ini dilakukan

untuk mencapai hasil akhir yang masuk akal, dapat dikonfirmasi, dan memiliki validitas.

1.8.8 Kualitas Data

Data yang diambil dan digunakan untuk penelitian ini akan sebaik mungkin mempertimbangkan latar belakang sosial politik dari negara yang diamati, yaitu Swiss. Peneliti akan menggunakan data yang memiliki kredibilitas yang baik. Untuk menjaga validitas penelitian, peneliti akan membandingkan dokumen resmi, literatur akademik, dan pemberitaan media; memastikan bahwa interpretasi data selaras dengan konsep institusionalisme; dan menyimpulkan didasarkan pada bukti empiris yang jelas.

1.8.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini mencangkup empat bab. Bab satu menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat. Pada bab ini, rumusan masalah juga diungkapkan dengan jelas bersamaan dengan tujuan, manfaat dan metode penelitian. Kajian pustaka dan kajian teoritis juga ditulis pada bagian ini.

Bab dua gambaran umum penelitian akan mendeskripsikan sejarah, perkembangan, dan dinamika hubungan luar negeri Swiss sebagai landasan pemahaman dalam membahas penelitian ini.

Bab tiga ini menyajikan hasil analisis terhadap perubahan pelaksanaan netralitas Swiss tahun 2022. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan data empiris dengan konsep institusionalisme historis untuk menjelaskan perubahan Netralitas Swiss. Bab ini terdiri dari empat sub bagian, yang masing-masing merupakan ciri-ciri institusionalisme historis menurut Hall & Taylor (1996).

Bab empat berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil analisis penelitian. Selain itu, bab ini memuat implikasi teoretis dan praktis, serta saran untuk penelitian selanjutnya.